

HUBUNGAN ANTARA PEMBIAYAAN DENGAN PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI UNGGULAN PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI SUMATERA



Oleh:

Putri Indah Lestari

Program Magister UIGM Palembang

Email : putriindahlestari3006@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pembiayaan perbankan syariah dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan dalam industri perbankan syariah di sepuluh provinsi yang ada di Sumatera. Pada penelitian ini digunakan data *time series* pertahun dengan periode penelitian dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015. Data yang digunakan meliputi data pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah di industri perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi per provinsi di Sumatera. Teknik analisis menggunakan analisis *Location Quotient* untuk mengetahui sektor basis dan non basis dalam pengembangan sektor ekonomi unggulan di industri perbankan syariah dan analisis korelasi sederhana untuk melihat hubungan pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi yang datanya berupa hasil dari analisis *Location Quotient*. Hasil analisis LQ menyatakan bahwa masing-masing provinsi yang ada di Sumatera memiliki beberapa sektor unggulan dari sembilan sektor ekonomi dengan hasil LQ > 1 yang berpotensi untuk dikembangkan pembiayaannya. Serta rata-rata sektor per provinsi memiliki hubungan yang cukup kuat, hubungan yang kuat kuat dan sangat kuat karena hasil analisis lebih dari 0,50, berarti kedua variabel tersebut sangat berpengaruh satu sama lain.

Kata Kunci: *Pembiayaan, Sektor Unggulan, Location Quotient, Korelasi Sederhana.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi yang baik merupakan salah satu tujuan dari suatu negara, apabila perekonomian di negara tersebut berkembang pesat dan mampu mensejahterahkan rakyatnya maka pertumbuhan ekonomi negara tersebut tergolong pertumbuhan ekonomi yang sudah baik. Terdapat beberapa kriteria yang menjadi patokan majunya pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara, salah satunya adalah pendapatan nasional.

Pendapatan nasional itu sendiri merupakan cerminan seberapa besar aktivitas perekonomian dalam negara tersebut secara keseluruhan. Tapi tidak hanya pendapatan nasional saja yang bisa dijadikan satu-satunya indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu

negara, salah satu indikator lainnya adalah perkembangan investasi di negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah proses yang berkala secara berkesinambungan peningkatan secara makro di bidang ekonomi di negara itu sendiri (Djojohadikusumo, 1994).

Suatu negara dikatakan pertumbuhan ekonominya maju, apabila banyak sektor perindustrian dan jasa yang berkontribusi daripada sektor pertanian. Tetapi tidak menutup kemungkinan dalam pengembangan sektor-sektor ekonomi lain yang bisa menjadi penunjang untuk pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Sektor ekonomi meliputi keseluruhan kegiatan perekonomian baik dalam skala besar maupun kecil. Bila membandingkan pertumbuhan antar daerah dalam suatu wilayah, maka akan ditemui kenyataan

beragam jenis pertumbuhan masing-masing daerah. Daerah yang tumbuh lebih cepat diantaranya disebabkan oleh struktur ekonominya sebagian besar mempunyai laju pertumbuhan yang cepat. Sebaliknya bagi daerah yang pertumbuhannya lambat, sebagian besar sektor ekonominya mempunyai laju pertumbuhan yang lambat (Yulianita, 2009). Dengan begitu terlihat jelas bahwa pengembangan sektor ekonomi sangat berpengaruh untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi.

Dalam proses pengembangan sektor ekonomi di Indonesia, setiap daerah memiliki potensi yang berbeda, Indonesia merupakan negara kepulauan yang tentunya setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang tidak sama, begitupun di tingkat pengembangan sektor ekonomi. Sehingga pendapatan dan subsektor yang menjadi potensial pada daerah tersebut berbeda pula. Dari keseluruhan sektor ekonomi dapat dilihat mana yang menjadi penyokong utama pertumbuhan ekonomi dan mana yang bisa menjadi sektor pendukung.

Perbankan pun sangat menyokong untuk pengembangan sektor ekonomi di Pulau Sumatera, karena tidak dipungkiri perputaran uang sangat berpengaruh terhadap pengembangan sektor ekonomi. Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Pembiayaan pada industri perbankan syariah cukup berkontribusi dalam kemajuan perekonomian di Indonesia umumnya dan khususnya Pulau Sumatera, banyak juga jenis pembiayaan dalam berbagai sektor salah satunya sektor ekonomi yang terdiri atas sembilan sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian, sektor pertambangan, sektor perindustrian, sektor listrik, gas dan

air, sektor konstruksi, sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor jasa dunia usaha, sektor sosial/ masyarakat dan lain-lainnya.

Di beberapa Provinsi dalam pulau Sumatera pembiayaan tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan, menandakan banyaknya kontribusi industri perbankan syariah terhadap pertumbuhan dan pengembangan sektor ekonomi yang memberikan efek positif untuk pertumbuhan ekonomi di Sumatera.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis berminat untuk menganalisis **“Hubungan Antara Pembiayaan dengan Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Pada Industri Perbankan Syariah di Sumatera”** yang terdiri dari 10 Provinsi yaitu Provinsi Nangroeh Aceh Darusalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Provinsi Kepulauan Riau. Dengan membandingkan total pembiayaan perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi per Provinsi di Pulau Sumatera dengan hasil pengembangan sektor ekonomi persektorannya yang menggunakan metode LQ sebagai acuan sektor basis dan non basis pada Industri perbankan syariah di Sumatera.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di tersebut maka permasalahan yang ingin diteliti yaitu:

1. Dalam pembiayaan industri perbankan syariah di sektor ekonomi, sektor manakah yang merupakan sektor basis dan non basis pada masing-masing Provinsi di Sumatera?
2. Bagaimanakah hubungan pembiayaan perbankan syariah dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan dalam industri perbankan syariah di sepuluh provinsi yang ada di Sumatera?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui sektor-sektor yang merupakan sektor basis dan sektor penunjang (non basis) dalam industri perbankan syariah per provinsi di Sumatera.
2. Menganalisis hubungan pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi dalam industri perbankan syariah di Sumatera.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperluas wawasan perbankan syariah terutama tentang kepentingan hubungan pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan pada industri perbankan syariah khususnya di Pulau Sumatera.
2. Manfaat praktis, dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat pada umumnya mengenai pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan pada industri perbankan syariah di Pulau Sumatera. Serta bagi pemberi kebijakan/ pemerintah sebagai bahan acuan dalam pemikiran pembentuk suatu kebijakan dalam pembiayaan syariah.

Landasan Teori

Teori Sektor Basis

Proses pembangunan suatu daerah diperlukan adanya sektor ekonomi yang dapat dijadikan andalan. Peran sektor andalan ini dalam pembangunan ekonomi sangat penting sekali karena sektor tersebut dapat memberikan dua sumbangan sebagai berikut:

1. Secara langsung menimbulkan kenaikan pada pendapatan faktor-

faktor produksi dan pendapatan daerah.

2. Menciptakan permintaan atau produksi industri lokal.

Semua kegiatan lain yang bukan kegiatan basis termasuk ke dalam kegiatan/sektor *service* atau pelayanan, tetapi untuk tidak untuk menciptakan pengertian yang keliru tentang arti *service* disebut saja sektor nonbasis. Sektor nonbasis (*service*) adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi lokal. Karena sifatnya yang memenuhi lokal, permintaan sektor ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat setempat. (Marwah, 2002:2)

Penelitian Terdahulu

Faisal (2013), meneliti dengan judul “Peran Pembiayaan Bank Syariah Terhadap Pengembangan Sektor Rill (Studi Kasus pada Bank Jatim Syariah Cabang Surabaya)”. Penelitian ini menggunakan model kualitatif dengan pendekatan *content analysis*. Data yang didapat sebagian besar bersumber dari wawancara dengan pihak bank syariah dan nasabah dan beberapa data dari dokumentasi. Dalam realitasnya pembiayaan yang paling banyak dikeluarkan oleh Bank Jatim Syariah untuk membiayai kegiatan produktif adalah pembiayaan dengan akad jual beli (*murabahah*), namun tidak menutup kemungkinan bahwaterdapat pembiayaan kegiatan produktif berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*).

Dalam penelitian Rama (2011), secara umum memperlihatkan, dalam jangka panjang, perbankan syariah yang direpresentasikan melalui total pembiayaan dan deposit secara positif dan signifikan berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi dan riil output di Indonesia. Ini menunjukkan secara empiris bahwa kehadiran perbankan syariah tidak hanya secara teoritis dan idiologis dapat mendinaminasi aktivitas perekonomian sebuah negara, tetapi teori ini dapat

dibuktikan secara empiris dalam lingkup perbankan syariah dan sektor ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian, perbankan syariah telah secara efektif memainkan perannya sebagai lembaga intermediasi yang memfasilitasi mobilisasi modal dari unit *surplus* ke unit defisit, sektor ekonomi yang memiliki kelebihan modal ke sektor ekonomi yang membutuhkan pembiayaan.

“Analisis Pembiayaan Sektor Konstruksi Pada Perbankan Syariah di Indonesia” yang diteliti oleh Kusmawati (2013), menemukan beberapa hubungan variabel yang signifikan dalam mempengaruhi penurunan rasio pembiayaan sektor konstruksi. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi untuk mengoptimalkan pembiayaan sektor konstruksi yaitu Perbankan syariah harus menekankan aspek 5 C dan 7 P untuk mengurangi jumlah pembiayaan bermasalah pada sektor konstruksi, dan harus lebih memfokuskan penyaluran DPK yang berhasil dihimpun dalam bentuk pembiayaan sektor riil dibandingkan penempatan dana pada PUAS dan SBIS. Berdasarkan analisis IRF, ekspansi pada pembiayaan perbankan syariah sektor konstruksi dapat meningkatkan pendapatan nasional yang diproksimasi melalui IPI. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan sektor konstruksi memiliki peran terhadap perekonomian, sehingga perlu didukung dan ditingkatkan.

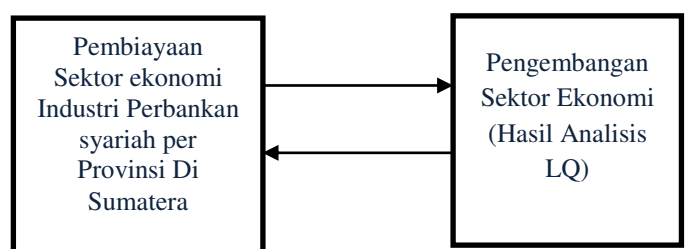
Penelitian Nandar (2010), yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan Bank Riau Syari’ah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau” menyimpulkan bahwa produk pembiayaan bank riau sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Riau. Karena hubungan antara kedua variabel sangat kuat korelasi yang positif menunjukkan hubungan yang searah. Artinya semakin banyak bank Riau syari’ah mengadakan pembiayaan sektor riil, maka PDRB pun meningkat. Dan pembiayaan bank Riau syari’ah dapat membantu pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau sebesar 0,2% dari jumlah pendapatan daerah pada tahun 2009.

Kerangka Pemikiran

Pembiayaan pada industri perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi meliputi sembilan sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air, sektor konstruksi, sektor perdagangan, restoran dan hotel, sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor keuangan, *real estate*, dan jasa perusahaan dan sektor jasa sosial masyarakat.

Selanjutnya untuk menganalisis sektor mana yang merupakan sektor basis dan non basis di industri perbankan syariah yang berdasarkan sektor ekonomi peneliti menggunakan metode *Location Quotient* (LQ), dengan variabel pembiayaan perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai oleh Industri perbankan syariah pada masing-masing Provinsi di Sumatera dan pembiayaan perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai oleh Industri perbankan syariah di Sumatera.

Setelah menganalisis sektor mana yang merupakan sektor basis dan non basis pada industri perbankan syariah di Sumatera dengan menganalisis per sektor di masing-masing Provinsi. Selanjutnya dapat dilihat hubungan antara pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan pada industri perbankan syariah, dengan menganalisis menggunakan metode analisis korelasi sederhana. Dari penjelasan di atas dapat diuraikan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Hipotesis

Berdasarkan pada latar belakang, landasan teori dan penelitian-penelitian sebelumnya hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah terdapat hubungan positif antara pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi di industri perbankan syariah di Sumatera.

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian kali ini adalah Pulau Sumatera, yang terdiri dari 10 Provinsi yaitu, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu, Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan variabel penelitian pembiayaan industri perbankan syariah di sektor ekonomi dan pengembangan sektor ekonomi unggulan di Sumatera. Penelitian kali ini mengambil periode tahun 2009-2015 dengan data pertahun.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa *time series* data. Data yang digunakan meliputi data pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah di industri perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi per Provinsi di Sumatera dan data hasil analisis *location quotient* dari data pembiayaan perbankan syariah per Provinsi dan total pembiayaan di Sumatera. Data tersebut dapat diperoleh dari www.bi.go.id dan *website* bank-bank umum syariah. Penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber lain seperti jurnal, artikel serta literatur-literatur lainnya.

Metode Analisis

Analisis LQ

Location Quotient (Arsyad, 1999: 140-142) merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis sektor basis dan non basis. Dasar pemikiran teknik ini

adalah *economic base* yang intinya adalah : karena sektor basis menghasilkan barang dan jasa untuk pasar di daerah maupun diluar daerah yang akan menghasilkan pendapatan untuk daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah menyebabkan kenaikan konsumsi dan investasi di daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Peningkatan pendapatan tidak hanya menaikkan permintaan terhadap sektor basis, tapi juga menaikkan sektor non basis (lokal). Kenaikan permintaan ini akan mendorong kenaikan investasi pada sektor yang bersangkutan sehingga investasi modal dalam sektor lokal merupakan investasi yang mendorong sebagai akibat dari manfaat dari sektor basis. *Location Quotients* (LQ) digunakan sebagai usaha untuk mengukur konsentrasi dari berbagai kegiatan (sektor) dalam suatu daerah dengan cara membandingkan perannya dalam perekonomian Provinsi itu dengan peranan kegiatan sektor sejenis dalam perekonomian regional atau nasional. Rumusnya sebagai berikut :

$$LQ = \frac{X_{ir}/X_R}{X_{in}/X_N}$$

Keterangan:

- X_{ir} : Pembiayaan sektor i daerah studi Provinsi r
- X_R : Pembiayaan total semua sektor di daerah Provinsi r
- X_{in} : Pembiayaan Sektor i daerah studi Pulau Sumatera.
- X_N : Pembiayaan total semua sektor di daerah Pulau Sumatera.

Berdasarkan hasil perhitungan *Location Quotient* (LQ), dapat diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Nilai LQ di sektor $i=1$. Ini berarti bahwa pengembangan sektor i di daerah studi r adalah sama dengan pengembangan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi N;

2. Nilai LQ di sektor lebih besar dari 1. Ini berarti bahwa pengembangan sektor i di daerah studi r adalah lebih besar dibandingkan dengan pengembangan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi N . Dengan demikian, sektor i merupakan sektor unggulan daerah studi r sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi r ; dan
3. Nilai LQ di sektor lebih kecil dari 1. Ini berarti bahwa pengembangan sektor i di daerah studi r adalah lebih kecil dibandingkan dengan pengembangan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi N . Dengan demikian, sektor i bukan merupakan sektor unggulan daerah studi r dan bukan merupakan basis ekonomi serta tidak propektif untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi r .

Analisis Korelasi Sederhana

Analisis korelasi sederhana digunakan untuk mengungkapkan hubungan antara dua buah variabel, misalnya X dengan Y . Dalam analisis korelasi ini ada banyak koefisien korelasi yang dapat digunakan untuk mengungkapkan hubungan korelasi antara satu variabel dengan variabel lain, tergantung dari jenis/bentuk daya (skala pengukuran) yang digunakan (Puspowersito, 2008:160). Dari data *time series* didapatlah rumus sebagai berikut:

$$r_{KY} = \frac{\sum_i [(X_i - \bar{X}) - (Y_{i-d} - \bar{Y})]}{\sqrt{\sum_i (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_i (Y_{i-d} - \bar{Y})^2}}$$

Dimana :

- r_{KY} : Besarnya koefisien korelasi silang antara pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi
- X dan Y : Nilai rata-rata deret X (pembiayaan) i dan Y (pengembangan sektor ekonomi) $_i$
- d : Waktu keterlambatan (*time lag*)

Berdasarkan analisis korelasi sederhana, dapat diketahui hasil sebagai berikut:

R	Keterangan
0	Tidak ada korelasi
0,00 – 0,25	Korelasi sangat lemah
0,25 – 0,50	Korelasi cukup
0,50 – 0,75	Korelasi kuat
0,75 – 0,99	Korelasi sangat kuat
1	Korelasi sempurna

Definisi Operasional Variabel

1. Pembiayaan Industri perbankan syariah meliputi pembiayaan bank umum syaria'ah dan unit usaha syaria'ah berdasarkan sektor ekonomi yang terdiri dari sembilan sektor yaitu sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian, sektor pertambangan, sektor perindustrian, sektor listrik, gas dan air, sektor sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, sektor jasa dunia usaha, dan sektor sosial/ masyarakat.
2. Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan
Pengembangan sektor ekonomi unggulan dalam industri perbankan syariah didapatkan dari perbandingan pembiayaan per Provinsi di Sumatera dengan total keseluruhan pembiayaan industri perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi di Sumatera dengan menggunakan metode analisis *Location Quontient*. Untuk mengetahui sektor basis dan non basis di pembiayaan industri perbankan syariah berdasarkan sektor ekonomi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Keadaan Geografi

Sebagai salah satu pulau terbesar keenam di dunia, Pulau Sumatera merupakan salah satu pulau yang terdapat di Indonesia, dengan luas 473.481 km² yang terletak pada koordinat antara 95° sampai 105° Bujur Timur dan 6° Lintang Utara sampai 6° Lintang Selatan. Sejarah terbuatnya nama pulau Sumatera ini dari

keberadaan kerajaan samudera yang letaknya di pesisir timur aceh, dan datangnya pengunjung dari maroko yang sering melafalkan samudera menjadi sumatera. Pada abad ke-16 nama Sumatera tercantum pada peta-peta buatan Portugis untuk menamai pulau ini. Pulau Sumatera ini sendiri lebih dikenal dengan sebutan pulau emas, dan tanah emas dari jaman dahulu, karena berlimpahnya sumber daya alam yang dimiliki oleh Pulau Sumatera ini sendiri. (Website resmi Wikipedia, 2016).

Sebelum terjadinya pemekaran wilayah Pulau Sumatera pada awalnya terdiri atas 8 Provinsi yaitu, Provinsi Nangroeh Aceh Darusalam, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi dan Provinsi Bengkulu, dan setelah terjadinya pemekaran wilayah bertambah dua provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan pemecahan wilayah dari Provinsi Riau dan Kepulauan Bangka-Belitung yang merupakan pemecahan wilayah dari Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel 4.1 Luas Wilayah Provinsi Di Pulau Sumatera

No.	Provinsi	Luas Daerah (km ²)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	57,956.00
2	Sumatera Utara	72,981.23
3	Sumatera Barat	42,012.89
4	Riau	87,023.66
5	Jambi	50,058.16
6	Sumatera Selatan	91,592.43
7	Bengkulu	19,919.33
8	Lampung	34,623.80
9	Kepulauan Bangka Belitung	16,424.06
10	Kepualauan Riau	8,201.72
Jumlah/ Total		473,481

Sumber: indonesiadata.co.id, 2016

Pulau Sumatera memiliki luas daerah sebesar 473,481 km², dari 10 provinsi yang ada di Sumatera. Provinsi Sumatera selatan memiliki daerah paling luas mencapai 91,592.43 km² serta memiliki persentase lebih dari 19% terhadap luas keseluruhan Pulau Sumatera dan Provinsi Kepulauan Riau adalah Provinsi yang wilayahnya paling kecil dengan luas 8,201.72 km² yang berarti hanya memiliki persentase 0,017% terhadap luas Sumatera.

Pembiayaan Perbankan Syariah

Perbankan syariah memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah setiap tahunnya semakin meningkat, dan tak inginnya masyarakat muslim bertransaksi secara riba, maka jalannya pembiayaan perbankan syariah setiap tahun mengalami peningkatan yang sangat signifikan, salah satunya dalam sektor ekonomi.

Tidak hanya itu saja dengan diberlakukan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, membuat pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. (Kajian Regional Bank Indonesia, 2016)

Tabel 4.2 Distribusi Pembiayaan Industri Perbankan Syariah Di Sumatera Per Sektor Tahun 2009-2015 (persen)

Sumatera	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian	16,3	14	12	11	11	12	12,3	12,7
Pertambangan dan penggalan	0,15	0	0	0	0	1	1,3	0,4
Industri pengolahan	2,	1	2	3	1	3	2,9	2,1
Listrik	0,4	0	0	0	0	1	0,6	0,3
Konstruksi	8,3	8	8	6	6	6	5,1	6,8
Perdagangan, restoran dan hotel	24,5	28	28	27	26	21	20	24,9
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	1,7	2	1	1	1	2	2,4	1,6
Jasa dunia usaha	39,9	41	42	44	47	47	47	44
Jasa sosial masyarakat	6,7	5	7	7	8	8	8	7,1

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (data diolah)

Pada Tabel 4.2 distribusi pembiayaan industri perbankan syariah persektor menunjukkan rata-rata bahwa sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian berkembang sebesar 12,7 persen dalam tujuh tahun kebelakang. Sektor listrik dalam tujuh tahun ini paling kecil memberikan distribusi pembiayaan di Sumatera, sebesar 0,3 persen saja. Sektor jasa dunia usaha yang paling banyak memberikan distribusi pembiayaan dari tahun-ketahun, dan rata-ratanya sebesar 44 persen dari total pembiayaan industri perbankan syariah di Sumatera pada tahun 2009-2015. Perdagangan, restoran dan hotel juga merupakan salah satu sektor yang memberikan distribusi pembiayaan yang cukup tinggi tercatat hampir lebih dari 20 persen sektor ini berkontribusi untuk pengembangan sektoral pada masing-masing sektor dalam pembiayaan industri perbankan syariah.

Hasil distribusi pembiayaan ini bila dilihat dari trennya untuk sektor pertanian, sektor konstruksi serta sektor perdagangan tren sektor tersebut menurun, walaupun sektor ini memberikan distribusi pembiayaan yang tinggi untuk tujuh tahun terakhir. Sektor industri pengolahan mengalami fluktuasi dalam tujuh tahun terakhir dikarenakan tidak stabilnya pembiayaan pada sektor ini yang kadang naik dan turun, tetapi sektor listrik yang distribusinya paling kecil sektor ini trennya dalam tujuh tahun terakhir naik terlihat di tahun 2015 sektor ini mulai memberikan distribusinya. Sektor pengangkutan, jasa dunia usaha serta sektor jasa sosial masyarakat pun merupakan sektor yang trennya naik untuk tujuh tahun terakhir hal ini disebabkan pembiayaan pada sektor ini selalu mengalami kenaikan dan stabil untuk distribusi pembiayaannya.

Pembahasan

Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan

Hasil Analisis Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan 10 Provinsi di Sumatera Tahun (2009-2015)

Sektor	Rata-rata <i>LQ</i> (2009-2015)										
	Aceh	Sumut	Sumbar	Sumsel	Babel	Jambi	Bengkulu	Riau	Kepri	Lampung	Sumatera
Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian	0,19	1,48	0,37	0,6	0,73	0,59	1,4	1,5	0,01	0,42	0,7
Pertambangan dan penggalian	0	0,91	0,23	3,63	0,12	2,2	1,1	0,78	1,4	0,47	0,9
Industri pengolahan	0,77	1,18	1,5	0,5	0	0,83	0,37	0,66	0,92	0,9	0,86
Listrik	0,48	1,03	0	2,66	0,08	0,16	0,2	0,32	0,18	1,07	0,79
Konstruksi	0,9	1,28	0,1	1,49	0,15	0,22	0,2	1,8	0,27	0,11	0,77
Perdagangan, restoran dan hotel	1,07	1	1,22	0,88	1,01	1,05	1,2	0,6	0,42	0,97	0,8
Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi	0,3	0,92	0,38	0,56	0,28	0,35	0,59	1,8	3,15	0,31	0,8
Jasa dunia usaha	1,13	0,66	0,88	0,74	0,57	0,99	0,93	0,89	1,7	0,97	0,82
Jasa sosial masyarakat	1,04	0,72	1,12	0,89	4,7	0,71	0,8	0,8	0,4	1,5	0,87

Tabel 4.3 merupakan hasil rata-rata analisis *Location Quotient* sektor ekonomi dalam pengembangan sektor ekonomi unggulan pada industri perbankan syariah di Sumatera per provinsi untuk tujuh tahun terakhir (2009-2015). Bila hasil lebih dari 1 maka pembiayaan dalam sektor ekonomi tersebut merupakan sektor basis dalam analisis sektor ekonomi industri perbankan syariah. Hasil analisis untuk Pulau Sumatera terlihat bahwa sektor pertambangan dan penggalian walaupun belum menjadi sektor unggulan tetapi berpotensi untuk menjadi sektor unggulan dalam pengembangan sektor ekonomi pada industri perbankan syariah di Sumatera, dikarenakan hasil analisis pada sektor ini hampir mendekati 1. Begitupun dengan sektor industri, perdagangan, pengangkutan, jasa dunia usaha serta jasa sosial masyarakat. Untuk sektor lainnya di Sumatera ini sendiri masih tergolong rendah dalam pengembangannya.

Provinsi Sumatera Utara memiliki paling banyak memiliki sektor unggulan

dalam Provinsi Sumatera Utara memiliki paling banyak memiliki sektor unggulan dalam pembiayaan perbankan syariah, seperti sektor pertanian, industri pengolahan, listrik, konstruksi, dan perdagangan. Di Sumatera sektor pertanian dalam tujuh tahun terakhir yang menjadi sektor unggulan berada di Provinsi Sumatera Utara, Bengkulu dan Riau, untuk sektor pertambangan dan penggalian yang menjadi sektor unggulan di Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu dan Kepulauan Riau. Sektor industri pengolahan sektor unggulannya di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sektor listrik di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Lampung. Sektor konstruksi di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan dan Riau. Sektor perdagangan, restoran dan hotel di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bangka Belitung, Jambi dan Bengkulu. Sektor pengangkutan, pergudangan dan komunikasi berada di Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Sektor jasa dunia usaha di Provinsi Aceh, dan

Kepulauan Riau, serta sektor jasa sosial masyarakat berada di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Bangka-Belitung dan Lampung. Jadi setiap provinsi memiliki

sektor unggulan masing-masing dalam pengembangan sektoralnya di industri perbankan syariah.

Hasil Analisis Hubungan Antara Pembiayaan dengan Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan pada Industri Perbankan Syariah per-Provinsi di Sumatera Tahun (2009-2015)

	R																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
Aceh	- 0,56	A	-	-	0,3	C	-0,26	A	0,5	C	0,3	C	0,4	C	0,9	E	0,34	C
Sumut	0,2	B	-0,4	A	0,6	D	0,96	E	0,3	C	0,7	D	0,4	C	0,8	E	0,59	D
Sumbar	0,64	D	0,94	E	0,6	D	-	-	0,9	E	0,6	D	0,8	E	-0,1	A	0,62	D
Sumsel	0,59	D	0,36	C	0,9	E	0,88	E	0,7	D	0,4	C	0,9	E	0,4	C	0,44	C
Babel	0,94	E	0,87	E	-	-	-0,22	A	0,9	E	0,9	E	-	-	0,6	D	0,15	B
Jambi	0,96	E	0,05	B	0,8	E	0,9	E	1	F	0,5	C	-	-	0,4	C	0,59	C
Bengkulu	0,15	B	-	-	0,8	E	-	-	0,7	D	1	F	0,4	C	-0,2	A	0,4	C
Riau	- 0,06	A	-	-	0,8	E	0,95	E	0,8	E	0,3	C	0,5	C	-0,2	A	0,87	E
Kepri	-0,2	A	-	-	0,1	B	-	-	1	F	0,3	C	0,5	C	-0,3	A	0,59	D
Lampung	0,49	C	0,15	B	0,9	E	0,69	D	0,9	E	0,5	C	0,7	D	0,2	B	0,68	D

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (data diolah)

Keterangan :

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Sektor Pertanian, Kehutanan dan sarana Pertanian | A. Tidak Ada Hubungan |
| 2. Sektor Pertambangan | B. Hubungan Sangat Lemah |
| 3. Sektor Industri | C. Hubungan Cukup |
| 4. Sektor Listrik | D. Hubungan Kuat |
| 5. Sektor Konstruksi | E. Hubungan Sangat Kuat |
| 6. Sektor Perdagangan, Restoran dan Hotel | F. Hubungan |
| 7. Sektor Pengangkutan, pergudangan dan Komunikasi | |
| 8. Sektor Jasa Dunia Usaha | |
| 9. Sektor Sosial Masyarakat | |

Tabel 4.15 memaparkan hasil penelitian korelasi sederhana antara pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan pada industri perbankan syariah di 10 provinsi yang ada di Sumatera, berdasarkan hasil penelitian untuk Provinsi Aceh dengan hasil Rsebesar -0,56 pada pembiayaan sektor ekonomi pertanian, kehutanan dan sarana pertanian tidak memiliki hubungan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan di industri perbankan syariah, hal ini disebabkan jumlah pembiayaan industri perbankan syariah pada sektor tersebut memang tidak begitu besar dan setiap tahunnya pembiayaan pada sektor ini tidak stabil karena sistem pertanian, kehutanan dan sarana pertanian yang bukan merupakan sektor unggulan pada provinsi ini, sehingga pengembangannya pun tidak menjadi prioritas, dan sektor jasa dunia usaha pada Provinsi Aceh memiliki hubungan yang sangat kuat disebabkan

pembiayaan pada sektor ini untuk setiap tahunnya mengalami kenaikan yang signifikan dengan diikuti hasil pengembangan sektor ekonominya yang merupakan sektor basis dalam pembiayaan industri perbankan syariah dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir (2009-2015).

Provinsi Sumatera Utara memiliki pembiayaan industri perbankan syariah yang paling tinggi diantara provinsi lainnya yang ada di Sumatera, hal ini disebabkan tingginya permintaan akan pembiayaan industri perbankan syariah di sektor ekonomi pada provinsi ini, pada sektor pertanian walaupun sektor ini merupakan sektor basis dalam pembiayaan industri perbankan syariah tetapi hubungan yang dimiliki antara pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan ini sangat lemah. Hal ini disebabkan tidak signifikannya perkembangan pembiayaan yang kadang mengalami kenaikan tetapi tahun berikutnya mengalami penurunan pembiayaan, berakibat pada pengembangan sektor ekonomi juga mengalami ketidakstabilan.

Pada sektor pertambangan dan penggalian tidak memiliki hubungan antara pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan pada sektor tersebut, disebabkan hasil pengembangan sektor ekonomi unggulan di sektor ini selalu mengalami penurunan untuk 4 tahun kebelakangan (2012-2015) walaupun pembiayaannya naik tetapi tidak berpengaruh terhadap pengembangan sektor ekonominya, lain halnya dengan sektor listrik yang memiliki hubungan yang sangat kuat antara pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonominya, walaupun bila di bandingkan dengan jumlah pembiayaan yang lain sektor listrik tergolong kecil, tetapi di antara sembilan provinsi lainnya di Sumatera sektor listrik di Provinsi Sumatera Utara paling tinggi pembiayaannya dan merupakan salah satu sektor unggulan di pembiayaan industri perbankan syariah. Hal itu yang menyebabkan hubungan di sektor listrik sangat kuat.

Hubungan pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi industri perbankan syariah pada sektor jasa dunia usaha di Provinsi Sumatera Barat tidak memiliki hubungan, padahal pembiayaan di sektor ini selalu mengalami kenaikan yang signifikan, tetapi tidak diikuti dengan pengembangan sektor ekonomi unggulannya pada sektor ini bukanlah sektor basis dan hasil dari analisis *Location Quotient*-nya untuk tiga tahun terakhir selalu mengalami penurunan yang menyebabkan kedua variabel di sektor ini tidak memiliki hubungan.

Pada Provinsi Sumatera Selatan sektor industri pengolahan, sektor listrik dan sektor pengangkutan memiliki hubungan yang sangat kuat antara pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan pada industri perbankan syariah di provinsi ini, hal ini dibuktikan dengan hasil R sebesar > 0.9 untuk sektor industri pengolahan, 0,88 untuk sektor listrik dan 0,9 untuk sektor pengangkutan, perdagangan dan komunikasi. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pembiayaan yang disertai dengan peningkatan hasil analisis pengembangan sektor ekonomi unggulan di industri perbankan syariah untuk ketiga sektor tersebut.

Hasil analisis R untuk Provinsi Bangka-Belitung di sektor pertanian sebesar 0,94 yang berarti hubungan pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan pada sektor pertanian, kehutanan dan sarana pertanian memiliki hubungan yang sangat kuat. Hal ini didasarkan dengan peningkatan jumlah pembiayaan pertanian dan diikuti dengan peningkatan hasil analisis pengembangan sektor ekonomi untuk sektor ini yang merupakan sektor basis dalam industri perbankan syariah di sektor ekonomi.

Di Provinsi Bangka-Belitung pada sektor industri pengolahan dan pengangkutan, perdagangan dan komunikasi tidak ditampilkan hasil analisis korelasi sederhananya disebabkan data pembiayaan pada sektor ini tidak lengkap untuk tujuh tahun kebelakang,

pembiayaan pada sektor ini baru dimulai pada tahun 2015 saja. Begitupun dengan hasil analisis di sektor listrik pada Provinsi Jambi, sektor pertambangan dan penggalian di Provinsi Bengkulu, Riau dan Kepulauan Riau.

Provinsi Jambi pada sektor pertambangan dan penggalian hubungan antara variabel pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulannya sangat lemah, karena hasil dari R sebesar 0,05. Walaupun pembiayaan industri perbankan syariah untuk dua tahun kebelakang (2014-2015) mengalami kenaikan yang signifikan, dan merupakan sektor basis untuk Provinsi Jambi, tetapi naik turunnya pembiayaan yang tidak stabil serta dalam pengembangan sektor ekonomi unggulannya juga tidak berdampak langsung menyebabkan hubungan kedua variabel di sektor ini sangat lemah.

Sektor jasa dunia usaha di Provinsi Bengkulu tidak memiliki hubungan antara variabel pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan pada industri perbankan syariahnya, hal ini terlihat dari hasil R yang sebesar, -0,2 walaupun pembiayaan perbankan syariah di sektor ini selalu mengalami kenaikan tetapi dalam proses pengembangan sektor ini hasil analisisnya tidak mengalami kenaikan. Sama halnya dengan sektor Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian serta sektor jasa dunia usaha di Provinsi Riau, pembiayaan mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi pengembangan sektor ekonomi unggulan hasilnya tidak mengalami kenaikan.

Mengapa dapat dikatakan hubungan itu sangat erat karena pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan sama-sama mengalami kenaikan baik itu dari jumlah pembiayaan maupun dengan kenaikan hasil sektor basis dan non basisnya. Apabila pembiayaan tinggi tetapi hasil dari pengembangan sektor ekonomi unggulannya rendah itu yang menyebabkan memiliki hubungan yang sangat lemah begitupun sebaliknya.

Dikatakan tidak memiliki hubungan sama sekali apabila diantara kedua variabel tersebut ada yang mengalami kenaikan tetapi variabel yang lain tidak mengalami perubahan apapun itu yang menyebabkan kedua variabel tidak memiliki hubungan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dari hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah pada sektor ekonomi di Sumatera setiap tahunnya mengalami kenaikan, hal ini berarti perkembangan industri perbankan syariah di Sumatera bertumbuh secara positif, akan tetapi dari 10 provinsi yang ada di Sumatera hanya 3 Provinsi saja yang pembiayaannya cukup tinggi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Riau.
2. Hasil analisis pengembangan sektor ekonomi unggulan untuk sembilan sektor yang dibiayai oleh industri perbankan syariah pada 10 provinsi yang ada di Sumatera pada tujuh tahun terakhir (2009-2015) menunjukkan bahwa Provinsi Aceh memiliki 3 sektor unggulan yaitu sektor perdagangan, restoran dan hotel (1,07), sektor Jasa dunia usaha (1,13), sektor jasa sosial masyarakat (1,04). Provinsi Sumatera Utara paling banyak sektor ekonomi unggulannya dalam pengembangan pembiayaan industri perbankan syariah karena 5 sektor dari 9 sektor ekonomi tersebut merupakan sektor basis. Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Riau memiliki 3 sektor unggulan dalam pengembangan pembiayaan industri perbankan syariah. Provinsi Bangka-Belitung, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau dan Lampung memiliki 2 sektor unggulan dalam

pengembangan pembiayaan industri perbankan syariah di Sumatera.

3. Rata-rata dari seluruh sektor ekonomi pada 10 provinsi yang ada di Sumatera hasil analisis R antara pembiayaan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan di industri perbankan syariah, kebanyakan sektor ekonominya memiliki hubungan cukup kuat, hubungan yang kuat, dan sangat kuat. Hal ini berarti kedua variabel tersebut sangat berkaitan satu sama lain. Beberapa sektor yang memiliki hubungan yang lemah dan tidak ada hubungan sama sekali itu sangat jelas berarti data kedua variabel tersebut perkembangannya tidak signifikan satu sama lain.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam upaya meningkatkan pengembangan sektor ekonomi unggulan dalam industri perbankan syariah agar lebih mengutamakan pengembangan sektor-sektor unggulan dengan tidak mengabaikan sektor lain dalam pengembangan pembiayaan pada industri perbankan syariah.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti menggunakan jangkauan data yang lebih luas dan lengkap dengan rentang periode waktu yang lebih panjang, sehingga lebih mampu untuk generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, F. (2012). Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Wilayah Kabupaten Bone Bolango Dengan Pendekatan Sektor Pembentuk PDRB. *ETIKONOMI*, 11(2).
- Amir, Hidayat, & Riphath, Singgih, 2005. *Analisis Sektor Unggulan untuk Evaluasi Kebijakan Pembangunan Jawa Timur menggunakan Tabel Input -Output 1994 dan 2000*, Jurnal Keuangan dan Moneter-Departemen Keuangan RI.
- Arief, S. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Arsyad, L. (1999). Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Aswandi, Hairul dan Kuncoro, Mudrajad. 2002. *Evaluasi Penetapan Kawasan Andalan : Studi Empiris di Kalimantan Selatan 1993-1999*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 17, No.1, 27-45.
- Boediono, 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE, Yogyakarta.
- Bank Indonesia Palembang. 2010. Kajian Ekonomi Regional Sumatera selatan Triwulan II Tahun 2010. Palembang : Bank Indonesia Palembang Bidang Ekonomi Moneter.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2016. Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha). Diambil pada tanggal 7 mei 2016 dari <https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/52>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. 2015. Tinjauan Regional Berdasarkan PDRB Kabupaten/Kota 2007-2010 Pulau Sumatera. Diambil pada tanggal 22 juni 2016 dari <http://bps.go.id/index.php/publikasi/838>
- Bank Indonesia. 2016. Sekilas Perbankan Syariah di Indonesia. Diambil pada tanggal 07 agustus 2016 dari <http://www.bi.go.id/id/perbankan/syariah/Contents/Default.aspx>
- Djojohadikusumo, S. (1994). Perkembangan pemikiran ekonomi: dasar teori ekonomi pertumbuhan dan ekonomi pembangunan.
- Faisal, R. F. (2013). Peran Pembiayaan Bank Syariah dalam Pengembangan Sektor Riil (Studi Kasus pada Bank

- Jatim Syariah Cabang Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- Gujarati, Damodar N, 2003, Basic Econometrics Fourth Edition , the Mcgrow Hill Companies Inc, New York
- Hasan, H. (2011). Analisis Industri Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1-183.
- Irman. 2002. *Analisis Potensi Sektor Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan*. Thesis. PPS UNSRI: Tidak dipublikasikan. Palembang
- Isretno, R.A. Evita. 2011. *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press.
- Jhingan, M.L. 1988. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Terjemahan C.V. Radjawali, Jakarta.
- Kadafi, Muhammad Fuad. 2013. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Konveksi Kota Malang*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Malang.
- Kara, Muslimin. 2013. Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Jurnal Ilmu Syaria'ah dan Hukum*. Vol. 47, No. 1, Juni 2013.
- Kasmir, 2001. Manajemen Perbankan. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hal. 92
- Kusumawati, N. N. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penentu Pembiayaan Perbankan Syariah pada Sektor Konstruksi di Indonesia.
- Machmud, Sofyan. 2002. Analisis Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Selatan. Universitas Sriwijaya.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. *Ekonomi Publik*. Jogjakarta : BPFE
- Marwah, Taufiq dan Syirod S. 2002. *Potensi Relatif Sektor-Sektor Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 1993-1997*. Kajian Ekonomi Vol 1. No. 1 Universitas Sriwijaya: Palembang.
- Nandar, B. E. (2011). Pengaruh pembiayaan Bank Riau Syariah (BPD Riau) terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Riau.
- Nauw, A., Koleangan, R., & Walewangko, E. N. (2015). Analisis Perbandingan Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Sorong Dan Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmia Efisiensi*, 15(4).
- Rama, Ali. 2011. Analisis Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi*. Universitas Islam Malaysia.
- Saptana, S., & Indraningsih, K. S. (2006, July). Mewujudkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif melalui pengembangan kemitraan usaha hortikultura. In *Forum Penelitian Agroekonomi* (Vol. 24, No. 1, pp. 61-76).
- Setiawan, Mohammad. 2014. *Analisis Sektor Ekonomi Basis Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Batu*. Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Setyowati, N. (2012). Analisis peran sektor pertanian di kabupaten sukoharjo. *SEPA: Vol. 8 No. 2*, 8(2).
- Simatupang, P. 1991. The Conception of Domestic Resource Cost and Net Economic Benefit for Comparative Advantage Analysis Agribusiness Division Working Paper No. 2/91, Centre for Agro-Socioeconomic Research. Bogor.
- Siregar, H., & Wahyuniarti, D. (2007). Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. In *Seminar Nasional" Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan* (Vol. 21).

- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*, Baduose Media, Cetakan Pertama, Padang.
- Sudaryanto, T dan P. Simatupang. 1993. Arah Pengembangan Agribisnis : Suatu Catatan Kerangka Analisis dalam Prosiding Perspektif Pengembangan Agribisnis di Indonesia. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Sukirno, Sadono. 1994. Pengantar Teori Makroekonomi. Jakarta : Rajawali Pers.
- Tarmizi, Nurlina. 2012. *Ekonomi Ketenagakerjaan* : Unsri Press
- Todaro, Michael P and Stephen C Smith. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta : Erlangga.
- Warjiyo, P. (2015). Pembiayaan Pembangunan Sektor UMKM: Perkembangan dan strategi ke depan. *INFOKOP*, 12(25).
- Wisdagdo, Ari Kuncara, dan Siti Rochmah Ika. 2008. "*The Interset Prohabition and Financial Performance of Islamic Banks: Indonesia Evidence*". International Business Research. Vol 1, No. 3.
- Wilardjo, S. B. (2005). Pengertian, Peranan Dan Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Value Added| Majalah Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1).
- Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Wikipedia. 2016. Pulau Sumatera. Diambil pada tanggal 22 juni 2016 dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra>
- Yuuhaa, M. I. W., Cahyono, H., & Unesa, K. K. S. (2013). Analisis Penentuan Sektor Basis dan Sektor Potensial di Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3).
- Yulianita, Anna. 2009. Analisis Sektor Unggulan Dan Pengeluaran Pemerintah Di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 2009, Hal 70-85